

**Perbedaan Tingkat Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta dan Non Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Studi pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Poliklinik Endokrinologi *Diabetic Center* Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Tahun 2016)**

Difference of the Level of Knowledge about JKN between BPJS and Non BPJS Health Insurance participants.

(Based on DM Type 2 Patients at Polyclinic Endocrinology Diabetic Center, RSUD Al Ihsan Tahun 2016)

¹Karin Rosalina Putri, ²Caecielia Wagiono, ³Hidayat Wahyu Aji

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹karinrputri@gmail.com, ²caecielia@yahoo.com, ³dr.ajihidayat@gmail.com

Abstract. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) is a health insurance program organized by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Since its establishment, there have been some problems caused by insufficient knowledge of patients. Diabetes Mellitus Type 2 patients need treatment for the rest of their life. As BPJS health insurance participants, therefore DM Type 2 patients need to know about JKN very well. This study aims to determine the difference about knowledge level of JKN between BPJS health insurance participants and non BPJS health insurance participants based on DM Type 2 patients at Polyclinic Endocrinology Diabetic Center, Al-Ihsan Regional Public Hospital (RSUD). This study was held by using cross-sectional analytic approach. The total sample for this research is 80 respondents selected by consecutive sampling. Retrieval of data using a questionnaire containing 18 questions about JKN and BPJS. Statistical analysis used in this study is chi square. The result shows that the knowledge level of JKN for BPJS health insurance participants has 5% with poor knowledge classification, 30% adequate knowledge, and 65% good knowledge. While, knowledge level of JKN for non BPJS insurance participants has 17,5% with poor knowledge classification, 10% adequate knowledge, 72,5% good knowledge. This study shows there is significant difference knowledge level between BPJS health insurance participants and non BPJS health insurance participants with p-value 0,036. The knowledge level of non BPJS health insurance participants with good knowledge classification has higher rate than BPJS health insurance participants. On the other hand, the knowledge level of non BPJS health insurance participants with poor classification has a relatively high with percentage 17,5%, therefore it needs to be socialized about JKN to the public.

Keywords: BPJS Health Insurance Participants, Knowledge, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sejak program ini dijalankan, masih banyak kendala dalam penyelenggaraannya yang disebabkan karena ketidaktahuan pasien. Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 membutuhkan pengobatan jangka lama seumur hidupnya. Sebagai peserta BPJS maka pasien DM Tipe 2 harus mengetahui tentang pelayanan JKN dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang JKN pada peserta BPJS dan non peserta BPJS Kesehatan pada pasien DM Tipe 2 di Poliklinik Endokrinologi *Diabetic Center* Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan.. Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan *cross-sectional*. Sampel penelitian ini sebanyak 80 responden dengan menggunakan teknik *consecutive sampling*. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang berisi 18 pertanyaan tentang JKN dan BPJS. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *chi square*. Hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan JKN pada peserta BPJS menunjukkan bahwa peserta dengan klasifikasi pengetahuan kurang sebesar 5%, pengetahuan cukup 30%, dan pengetahuan baik 65%. Sedangkan pada peserta non BPJS menunjukkan bahwa non peserta dengan klasifikasi pengetahuan kurang sebesar 17,5%, pengetahuan cukup 10%, pengetahuan baik 72,5%. Penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang JKN antara peserta dan non peserta BPJS Kesehatan dengan *p-value* 0,036. Tingkat pengetahuan tentang JKN pada peserta non BPJS dengan kategori baik lebih tinggi daripada peserta BPJS. Sebaliknya

untuk kategori kelompok pengetahuan kurang pada pasien non BPJS masih relatif tinggi dengan persentase 17,5%, maka masih perlu dilakukannya sosialisasi tentang JKN kepada masyarakat.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Peserta BPJS Kesehatan, Tingkat pengetahuan.

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Negara harus menjamin agar semua penduduknya dapat hidup sehat dan produktif. Kesehatan setiap warga negara harus dijamin oleh sebuah sistem yang memungkinkan setiap penduduk terbebas dari beban biaya berobat yang mahal.¹ Kesejahteraan sosial rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara khususnya dalam bidang kesehatan. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan diselenggarakannya sistem jaminan sosial nasional. Di Indonesia, jaminan sosial tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh suatu badan hukum yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai di implementasikan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia yang berjumlah 257,5 juta jiwa dapat terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Sosial paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang.^{3,4} Data terbaru per 8 Agustus 2014 menyebutkan bahwa jumlah total peserta BPJS Kesehatan hanya setengah dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.⁵ Masalah yang ada selain belum semua rakyat Indonesia ikut program JKN yaitu masih banyak peserta yang tidak patuh terhadap peraturan BPJS disebabkan salah satunya adalah ketidaktahuan pasien.⁶ Selain itu, banyak peserta yang masih kebingungan mengenai sistem rujukan pada program JKN yang diatur oleh BPJS Kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta BPJS pun belum tentu paham mengenai peraturan program JKN yang seharusnya dipatuhi demi kelancaran program sistem jaminan kesehatan ini. Ini adalah polemik yang selama ini masih menjadi kendala sekaligus tantangan bagi BPJS kesehatan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas.⁷

Diabetes adalah penyakit kronis yang kompleks dan membutuhkan perawatan medis terus menerus dengan strategi pengurangan risiko multifaktorial diluar dari kontrol glikemik. Pasien harus diberikan edukasi tentang manajemen diri dan juga dukungan yang sangat penting untuk mencegah komplikasi akut dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang.¹⁰ Pasien penderita DM tipe 2 ini membutuhkan pengobatan jangka lama seumur hidupnya yang bertujuan untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darahnya dan juga mencegah komplikasi yang akan ditimbulkan.

Salah satu kendala dari kinerja BPJS yang masih perlu ditinjau salah satunya dari masalah sosialisasi yang mungkin masih kurang sehingga jumlah peserta yang terdaftar masih setengah dari target yang harus dicapai dan belum semua peserta memahami pelayanan JKN. Diperlukan suatu analisa terhadap tingkat pengetahuan tentang JKN. Salah satu penatalaksanaan untuk mengetahui dan mengukur tingkat pengetahuan tersebut di masyarakat yaitu dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara pasien Diabetes Melitus tipe 2 peserta BPJS dengan non BPJS di Poliklinik Endokrinologi *Diabetic Center* RSUD Al-Ihsan Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan

- Nasional (JKN) pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 peserta BPJS di Poliklinik Endokrinologi Diabetic Center RSUD Al-Ihsan Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pasien Diabetes Melitus tipe 2 non BPJS di Poliklinik Endokrinologi Diabetic Center RSUD Al-Ihsan Bandung.
 3. Untuk mencari perbedaan tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara pasien Diabetes Melitus tipe 2 peserta BPJS dan non BPJS di Poliklinik Endokrinologi Diabetic Center RSUD Al-Ihsan Bandung.

B. Landasan Teori

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.¹¹ Menurut Rogers (1974) sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam orang tersebut terjadi proses berurutan, yakni:¹¹

- a. *Awareness* (kesadaran);
- b. *Interest* (merasa tertarik);
- c. *Evaluation* (menimbang-nimbang);
- d. *Trial* ketika subjek mulai mencoba melakukan sesuatu seperti apa yang dikehendaki oleh stimulus;
- e. *Adoption*, adalah ketika subjek telah mengadopsi atau berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai enam tingkat.¹¹

- a. Tahu (*know*).
- b. Memahami (*comprehension*).
- c. Aplikasi (*application*).
- d. Analisis (*analysis*).
- e. Sintesis (*synthesis*).
- f. Evaluasi (*evaluation*).

Untuk mengetahui pengetahuan suatu responden kita dapat mengukurnya dengan menggunakan angket atau wawancara. Pengetahuan dipengaruhi beberapa faktor baik internal maupun eksternal seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan sumber informasi.¹¹ Pengetahuan juga memiliki pembagian berdasarkan kategori, seperti berikut:¹²

- a. Baik: benar 76%–100% dari seluruh pertanyaan;
- b. Cukup: benar 56%–75% dari seluruh pertanyaan;
- c. Kurang: benar <56% dari seluruh pertanyaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi 2 lembaga besar, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.³ BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014.³

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Tujuan pelaksanaan program JKN adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan

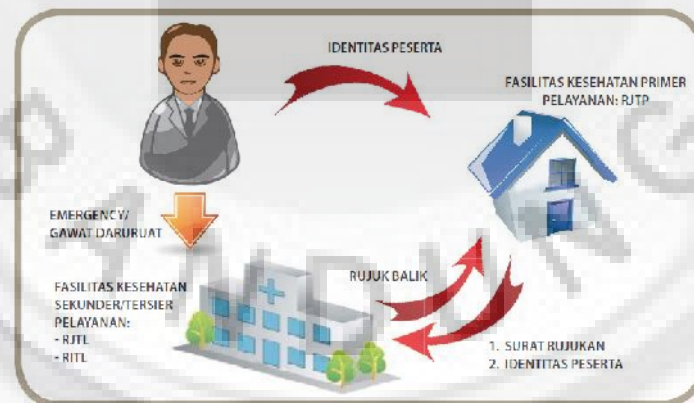
kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang.¹³ Peserta jaminan kesehatan di BPJS yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI). Proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan¹⁵

Proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁵

1. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjaannya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
3. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.

Hak peserta BPJS Kesehatan adalah mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan. Kewajiban peserta BPJS Kesehatan adalah mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I, menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak, mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.¹⁵

Alur pelayanan kesehatan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelayanan Kesehatan

Dikutip dari: Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan¹⁷

Diabetes melitus adalah gangguan metabolisme kronis yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. DM Tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin (resistensi insulin) dan membutuhkan pengobatan serta pemantauan terapi jangka panjang untuk menghindari komplikasi yang akan

ditimbulkan.¹⁶ Kota Bandung sebagai ibu kota dari Jawa Barat, penyakit Diabetes Melitus termasuk ke sepuluh terbesar penyakit.¹⁰ Pada tahun tahun 2010, data laporan bulanan per Puskesmas Kota Bandung dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, pasien yang menjalani rawat jalan dengan diagnosa Diabetes Melitus sebanyak 10.575 orang.¹⁷

Pengetahuan masyarakat mengenai Jaminan Kesehatan Nasional masih kurang. Supaya JKN dapat berjalan dengan baik, masyarakat perlu diberikan sosialisasi agar dapat memanfaatkan JKN dengan optimal sesuai dengan hak dan kewajiban tanpa melupakan kewajiban sebagai peserta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan Pengetahuan Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan Kepesertaan

Perbedaan tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan kepesertaan BPJS dan non BPJS pada pasien DM Tipe 2 di Poliklinik Endokrinologi RSUD Al-Ihsan Bandung, dapat dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Pengetahuan tentang JKN

	Tingkat Pengetahuan			Nilai p
	Kurang n (%)	Cukup n (%)	Baik n (%)	
Kepesertaan				
• BPJS	2 (5)	12 (30)	26 (65)	0,036*
• Non BPJS	7 (17,5)	4 (10)	29 (72,5)	

Data pada tabel diatas memperlihatkan perbedaan pengetahuan tentang JKN di analisis menggunakan metode uji chi square dengan nilai alpha sebesar 0,05 dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.0, diperoleh nilai P-value sebesar 0,036. Kemudian hasil perhitungan ini dibandingkan dengan derajat atau taraf kesalahan $\alpha = 5\%$. Setelah dilakukan analisis statistika, didapatkan bahwa p-value (0,036) lebih kecil dibandingkan taraf kekeliruan ($\alpha = 0,05$). Dari hasil perbandingan dalam analisis data, apabila p-value $< \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak atau H_1 gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang bermakna antara pasien Diabetes Melitus tipe 2 peserta BPJS dengan non BPJS di Poliklinik Endokrinologi Diabetic Center RSUD Al-Ihsan.

Pengetahuan responden menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan mengenai JKN pasien Diabetes Melitus tipe 2 peserta BPJS dengan non BPJS di Poliklinik Endokrinologi *Diabetic Center* RSUD Al-Ihsan Bandung. Menurut Notoatmodjo terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pada seseorang yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu umur dan pendidikan.¹¹

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa baik peserta BPJS Kesehatan maupun non BPJS pada tahun 2016 sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai JKN. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan terus meningkatkan sosialisasinya di tahun 2016 dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan sekaligus sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat program JKN.²² Masalahnya adalah mereka belum menjadi anggota BPJS padahal sudah mengetahui JKN dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelayanan dari BPJS yang masih dianggap kurang contohnya seperti harus mengantri lama dan pelayanan farmasi yang lama pula.²⁰ Sedangkan alasan pada peserta BPJS menjadi lebih rendah tingkat pengetahuannya dikarenakan rata-rata orang yang mengikuti BPJS adalah PNS

maupun pegawai perusahaan swasta yang secara otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS, karena setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan pegawainya. Sesuai dengan amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Namun hal tersebut dapat menyebabkan belum tentu orang yang terdaftar menjadi peserta BPJS sudah mengetahui dengan baik tentang asuransi JKN yang diberikan oleh BPJS karena mereka hanya sekedar terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.²³

Pengetahuan seorang individu erat kaitannya dengan perilaku yang akan diambilnya, karena dengan pengetahuan tersebut ia memiliki alasan dan landasan untuk menentukan suatu pilihan. Menurut peneliti pengetahuan responden tentang JKN yang termasuk kedalam kategori baik dapat mempengaruhi tindakan responden sebagai peserta JKN dalam menggunakan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur pelayanan JKN dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang termasuk kedalam program JKN. Begitu pula sebaliknya jika pengetahuan responden tentang JKN kurang, maka akan berpengaruh pada kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tersedia dan kurangnya penggunaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur pelayanan JKN, sehingga dapat menyebabkan kurang efektifnya program pelaksanaan JKN.²⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Poliklinik Endokrinologi *Diabetic Center* RSUD Al-Ihsan, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Tingkat pengetahuan pada peserta BPJS dalam kategori baik.
2. Tingkat pengetahuan pada peserta non BPJS dalam kategori baik.
3. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan tentang JKN antara peserta BPJS dan non BPJS, dimana tingkat pengetahuan pada peserta non BPJS lebih baik daripada tingkat pengetahuan pada peserta BPJS.

E. Saran

Saran Teoritis

Dengan berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih banyak agar dapat mengukur tingkat pengetahuan JKN secara lebih tepat, misalnya dengan membandingkan antara dua Rumah sakit atau lebih. Selain itu, diperlukan pula desain studi secara kualitatif agar mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai faktor lainnya.

Saran Praktis

1. Diperlukan sosialisasi secara merata dan lebih baik lagi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia terlebih pada poin-poin dimana peserta BPJS masih banyak yang belum memahami tentang JKN sehingga diharapkan dengan pengetahuan tentang JKN yang telah mereka miliki dapat meningkatkan pemanfaatan asuransi dari JKN BPJS tersebut.
2. Kepada BPJS itu sendiri, disarankan untuk lebih meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan yang

baik mengenai JKN tetapi belum menjadi anggota BPJS akan mengikuti program tersebut karena minat mereka sendiri, bukan hanya karena kewajiban saja.

3. Untuk pasien DM Tipe 2 terutama jika pasien tersebut sudah menjadi peserta BPJS yaitu kesehatan mereka akan lebih terjamin dimasa yang akan datang dengan mengikuti program asuransi kesehatan dari JKN ini terlebih jika mereka mengetahui dan mengerti tentang JKN itu sendiri.

Daftar Pustaka

- American Diabetes Association. 2015. Standards of Medical Care In Diabetes 2015. Volume 38. Tersedia dari: www.diabetes.org/diabetescare
- Bennet, P. 2008. Epidemiology of Type 2 Diabetes Mellitus In Le Roith et.al, Diabetes Mellitusa Fundamental and Clinical Text. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins.
- BPJS Kesehatan. Panduan Layanan Bagi peserta BPJS.
- BPJS Online. 2015. Peserta BPJS maunya ke RS Besar. Tersedia dari: <http://www.bpjs-online.com/peserta-bpjs-maunya-ke-rs-besar/>.
- Dinas Kesehatan Kota Bandung. 2010.
- Farisah, D. 2015. Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Makin Meningkat. Jakarta; 17 Tersedia dari: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/17/144540126/Tunggakan.Iuran.BPJS.Kesehatan.Makin.Membengkak>.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. Buku Saku FAQ (Frequently Asked Question) BPJS Kesehatan. Cetakan-1. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Kompas. 2014. Kinerja BPJS Kesehatan Semester I Tahun 2014. Tersedia dari: http://www.kompasiana.com/infobpjskesehatan/kinerja-bpjs-kesehatan-semester-i-tahun-2014_54f601a9a333116a7d8b47fd.
- Maabuat C. L. L, Maramis F. R. R, Sondakh R. C. et al. Hubungan Antara Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Wawonasa Kecamatan Singkil Manado Tahun 2013. 2013. hlm 1-6. Tersedia dari: <http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/christin-maabuat.pdf>
- Notoatmodjo, S. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Edisi 2. hlm. 127-130. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Putri AE. 2014. Seri Buku Saku-1: Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional. Edisi ke-1. Kantor Perwakilan Indonesia: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Putri AE. 2014. Seri Buku Saku-2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Edisi ke-1. Kantor Perwakilan Indonesia: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Siaran Pers BPJS Kesehatan.2016. BPJS Kesehatan Terus Tingkatan Sosialisasi Kepada Peserta Agar Tidak Salah Prosedur. Lampung.
- Wahyuni, N. D. 2013. Perusahaan Swasta Wajib Daftarkan Karyawan Ikut BPJS Kesehatan. Jakarta: Liputan6.com. Tersedia dari: <http://bisnis.liputan6.com/read/788472/perusahaan-swasta-wajib-daftarkankaryawan-ikut-bpjs-kesehatan>
- Wawan, A MD. 2010. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku. Yogyakarta: Nuha Medika.